



LKIP 2025

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2025, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka, sehubungan dengan itu laporan ini tidak hanya memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 tetapi juga memuat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa target memang berhasil dicapai, namun dilain pihak ada target yang belum dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang berada diluar kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.

Pencapaian kinerja tahun 2025 yang mencapai **95,93 % (kategori Baik)** ini tidak terlepas dari kerja keras semua unsur dinas yang bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan tujuan meningkatkan sektor Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus dibudayakan dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikan. Dengan cara seperti ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai menjadi unit kerja yang secara terus menerus melakukan perbaikan dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI,



PAULUS JERAMUN, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19770720 200604 1 011

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Perencana Ahli Muda	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai telah bekerja di atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Di samping itu, dalam rangka evaluasi, harus disiapkan juga indikator-indikator sebagai barometer untuk menilai capaian sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dalam dokumen RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan 3 sasaran dengan 10 indikator sasaran. Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi/target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun 2025 yang juga merupakan capaian kinerja ke-4 periode perencanaan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Jumah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Nilai Capaian Kinerja							
				Istimewa ($x > 100\%$)		Baik ($80\% < x \leq 100\%$)		Cukup ($60\% < x \leq 80\%$)		Kurang ($x \leq 60\%$)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Sasaran 1	3	117,69	2	66,67	0	0,00	0	0,00	1	33,33
2	Sasaran 2	3	70,11	0	00,00	1	33,33	1	33,33	1	33,33
3	Sasaran 3	4	100,00	0	00,00	4	100,00	0	0,00	0	00,00
Jlh	3 Sasaran	10	95,93	2	66,67	5	133,33	1	33,33	2	66,66



Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran adalah 95,93 % kategori kinerja **BAIK**.

Ke-3 sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator. Dari 10 (sepuluh) indikator, terdapat 2 (dua) indikator atau 20,00% kategori kinerja ISTIMEWA, terdapat 5 (lima) indikator atau 50,00% kategori kinerja BAIK, terdapat 1 (satu) indikator atau 10,00% dengan kategori kinerja cukup, dan terdapat 2 (dua) indikator atau 20,00% kategori kinerja KURANG

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, maka ditetapkan anggaran yang tersebar di 5 (lima) program dan beberapa kegiatan/sub kegiatan strategis sebesar Rp.3.221.654.341,00 dengan penyerapan Rp.3.095.548.732,00 atau 96,09%.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI,



PAULUS JERAMUN, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19770720 200604 1 011

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Perencana Ahli Muda	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sumber Daya Manusia Aparatur.....	6
E. Sistematika Penulisan LKIP.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis 2021-2026	10
B. Indikator Kinerja Utama	13
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	19
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	21
3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya	25
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026	28
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	32
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
3.4.1 Sumber Daya Manusia Aparatur	38
3.4.2 Akuntabilitas Keuangan Dinass Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2024	41
3.4.3 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	46



3.4.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran	47
---	----

BAB IV PENUTUP	49
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

1. RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektivitas. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Perbup no. 65 tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan bidang Persandian, dan urusan Pemerintahan bidang Statistik dan tugas pembantuan lainnya dan menyelenggarakan fungsi yaitu:

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh 3 (tiga) Bidang dan 1 (Satu) Sekretariat yaitu:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas
2. Bidang Komunikasi dan Informasi publik (KIP) yang di pimpin oleh kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi
4. Bidang Statistik dan Persandian yang dipimpin oleh Kepala bidang Statistik dan Persandiaan
5. Kelompok Jabatan fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelompok jabatan fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok substansi tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Pelaksanaan tugas Pada bagian kedua Perbup. No 65 tahun 2022 pasal 205, ayat :

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada substansi tugas dipimpin oleh sub koordinator jabatan fungsional.
- (3) Sub koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sub koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional.
- (5) Sub koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.



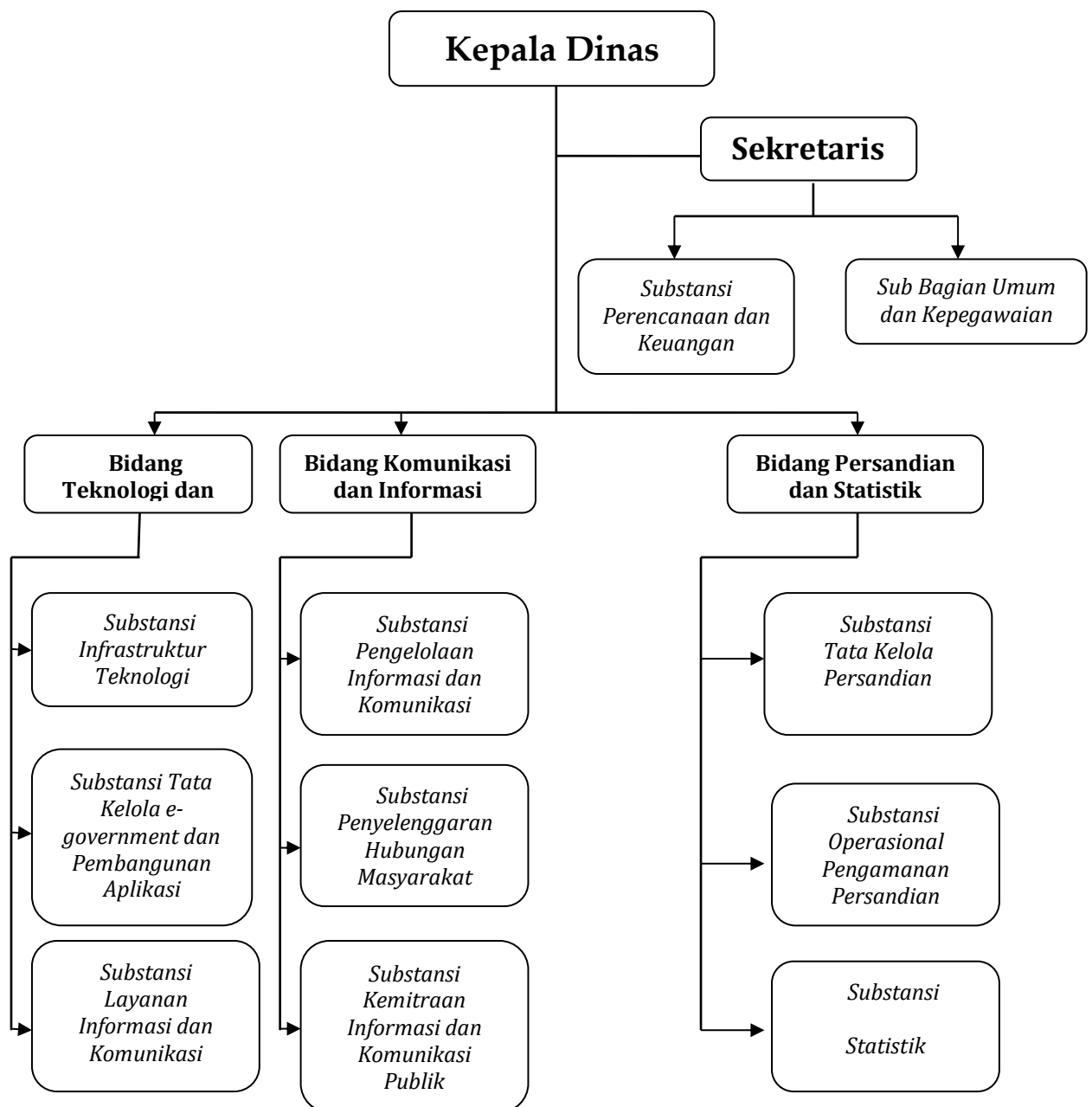
C. STRUKTUR ORGANISASI

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi yaitu:
 - 1. Substansi Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi yaitu:
 - 1. Substansi Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik;
 - 2. Substansi Penyelenggaraan hubungan masyarakat
 - 3. Substansi kemitraan informasi dan komunikasi publik.
- d. Bidang Teknologi dan informatika :
 - 1. Substansi infrastruktur teknologi
 - 2. Substansi tata kelola e-government dan pembangunan aplikasi
 - 3. Substansi Layanan Informasi dan komunikasi Elektronik;
- d. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi yaitu:
 - 1. Substansi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Substansi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - 3. Substansi Statistik.

Struktur Organisasi:

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai





D. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Sumber Daya Aparatur Bidang Urusan :

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai didukung oleh sejumlah pegawai yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai. Adapun aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Bidang Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sebanyak 40 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 12 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 3 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-		1	1
3	Kepala Bidang	-	-		3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5.	Pejabat Fungsional			5		5
6.	Staf	-	5	14	-	19
JUMLAH		-	5	20	5	30
P3K			3	9		12
THL		1	-	2		3

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2024

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Plt.Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang		3	-	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		1	-	-	1
5.	Pejabat Fungsional	-	5	-	-	5
6.	Staf		14	1	4	19
Total		1	24	1	4	30
P3K			9	-	3	12
THL			2		1	3

E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, maka tersedia sarana pendukung kegiatan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	1 unit	1 unit	-	-	Masih kurang ruangan PPID
2.	Kantor RSPD	1 Unit	1 unit	-	-	Fasilitas belum memadai-
3.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1 unit	1	-	1	Kondisi rusak berat
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	1 unit	1	-	-	
5.	Geanset	1 unit	-	-	1	Rusak berat
6.	Kursi Kerja	57 buah	43	-	14	100 buah
7.	Meja	29 buah	23	-	6	18
8.	Laptop	7 Unit	7	-	-	Masih kurang 20



						unit
9.	Printer	5 Unit	5	-	-	Kurang 4 unit
10.	Komputer	4 Unit	4	-	-	Masih kurang 3 unit

F. MASALAH-MASALAH

1. Belum adanya Diklat bagi pejabat yang menduduki jabatan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan Bidang Persandian.
2. Masih kurangnya sarana prasarana dibidang Komunikasi Informasi publik, Persandian dan Statistik dan Bidang Teknologi informasi Publik
3. Belum adanya jaringan terpusat yang menghubungkan setiap perangkat daerah
4. Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
7. belum adanya data center (pusat data) yang terintegrasi
8. Masih banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi
9. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi
10. Belum maksimalnya Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
11. Belum maksimalnya jangkauan siaran LPPL RSPD



G. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika penulisan LKIP ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Kominfo, komposisi sumber daya manusia aparatur dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini akan dijelaskan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2025 yang terdiri atas Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2025. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2025.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2025-2029

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2025–2029, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Dalam penyusunan Renstra tersebut, penetapan visi dan misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. **VISI :** MANGGARAI YANG SEJAHTERA, BERSIH, BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING

2. **MISI :**

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau .
2. Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan.
3. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Berbagai Macam Ancaman dan Bencana.
4. Membangun Sarana dan prasarana Yang Memadai untuk Mendukung Terwujudnya Kabupaten Sejahtera.
5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas pelayanan Kepada Masyarakat.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai mengemban misi ke-5 yaitu: ***“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Teknologi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”***



3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata lain tujuan mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas pembangunan. Di atas prioritas itulah semua program dan kegiatan serta alokasi anggaran diarahkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Manggarai Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Meningkatnya Keamanan Dan Kualitas Data Informasi Dan Komunikasi Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks keterbukaan Informasi Publik (Angka)	87,50	88,00	88,50	90,00	90,50	90,50
		Meningkatnya Penerapan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintahan Digital (Angka)	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80
		Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Mendukung Smart City	Indeks Smart City (Angka)	2,78	2,98	3,18	3,38	3,58	3,58
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	2,26	0	2,28	0	2,28
		Meningkatnya Kepuasan Pengguna Terhadap Pelayanan Persandian	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Skor)	0-174	175-312	175-312	175-312	313-535	313-535



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks SPBE / Indks PEMDI	Angka	Hasil Evaluasi Kemen PANRB	Kemen PANRB	Bidang TIK
Meningkatnya Penerapan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan informasi Publik	Angka	Hasil Pengukuran Komisi Informasi Pusat perwakilan NTT	Komisi Informasi Pusat Perwakilan NTT	Bidang KIP
Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Mendukung Smart City	indeks Smart City	Angka	Hasil evaaluasi Kemenkomdigi	Kemenkomdigi	Bidang KIP
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik	Indeks pembangunan statistik	Poin	Hasil evaluasi Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Kepuasan Pengguna Terhadap Pelayanan Persandian	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	skor	Hasil penilaian Mandiri Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Bidang Statistik dan Persandian

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*by design and sustainable*).

Sedangkan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
- (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- (4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah dan
- (5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2025 dapat dibaca pada table 2.2. berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Stretagis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatnya birokrasi yang kapabel		Indeks SPBE	Nilai	2,80
1.	Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100,00
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Persen	40,00
2.	Meningkatnya Akses Informasi Publik	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	85,70
		Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM)	Persen	100,00
		Persentase OPD yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00
3.	Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi	Persen	100,00
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100,00
		Persentase Sistim Data Statistik	Persen	100,00

		yang terintegrasi		
4.	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	98,00

No	Uraian	Satuan	Target
1.	Jumlah Inovasi	Inovasi	1
2.	Jumlah Penerimaan /PAD :	Rp.	10.000.000
	Retribusi RSPD Kabupaten Manggarai	Rp.	10.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.269.650.688,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	315.293.480.00	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	123.930.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	54.395.000,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	34.560.523,00	APBD
Jumlah		3.797.829.480	APBD

perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dimaksud, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatnya birokrasi yang kapabel		Indeks SPBE	Nilai	2,80
1.	Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100,00
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Persen	40,00
2.	Meningkatnya Akses Informasi Publik	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	85,70
		Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM)	Persen	100,00
		Persentase OPD yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00
3.	Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi	Persen	100,00
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100,00
		Persentase Sistem Data Statistik yang terintegrasi	Persen	100,00



4.	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase urusan rutin pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar	Persen	98,00
----	--	--	--------	-------

No	Uraian	Satuan	Target
1.	Jumlah Inovasi	Inovasi	1
2.	Jumlah Penerimaan /PAD :	Rp.	10.000.000
	a. Retribusi RSPD Kabupaten Manggarai	Rp.	10.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.539.806.966,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	569.292.375,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	78.680.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.895.000,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3.980.000,00	APBD
Jumlah		3.221.654.341,00	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mennginformasikan secara terbuka keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak yang berwenang memberi amanah. Laporan ini memberikan gambaran tingkat capaian masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi/target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TRIWULAN 1V		Ket
				RENSTRA	REALISASI	%	
1	2	3		4	6	7	12
Tujuan	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE		2.80	2.90	103.57	
1.	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	1.	Indeks SPBE	2.80	2.90	103.57	
		2.	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00	200,00	200	
		3.	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	40	16,5	49,50	
	Rata-rata Sasaran Strategis 1					117,69	
2.	Meningkatnya akses informasi publik	1.	Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	85.70	66,67	77,79	
		2.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	100.00	100,00	100,00	
		3.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00	32,55	32,55	
	Rata-rata Sasaran Strategis 2					70,11	

3.	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	100.00	100,00	100,00	
		2.	Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	100.00	100,00	100,00	
		3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00	100,00	100,00	
		4.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00	100,00	100,00	
	Rata-rata Sasaran Strategis 3					100	
Rata-rata Sasaran 1 s.d 3						95,93	

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami sedikit kenaikan sebesar 3,93 % , yaitu dari 92 % pada tahun 2024 menjadi 95,93 % tahun 2025, akan tetapi masih ada beberapa indicator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja yang belum memenuhi target, ke depannya akan menjadi tugas dan Perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika agar lebih bagus dan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas terdapat 2 indikator tujuan dan capaian indikator tujuan tersebut sudah melebihi target

Sementara hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran, terdapat 2 indikator atau 20,00% yang melebihi target, capaian indikator sasaran yang sesuai target sebanyak 5 indikator atau 50,00% dan capaian indikator sasaran yang tidak mencapai target sebanyak 3 indikator atau 30,00%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
1	Melebihi/Melampaui Target	2	100,00
Jumlah		2	100,00

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No	Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
1	Melebihi/Melampaui Target	2	20,00
2	Sesuai Target	5	50,00
3	Tidak Mencapai Target	3	30,00
Jumlah		10	100,00

3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut



Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SAT	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,60	2,90	111,53	2,80	2,90	103,57
Sasaran 1	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Nilai	2,60	2,90	111,53	2,80	2,90	103,57
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	33,33	16,50	49,50	40	16,50	49,50
	Rata-rata sasaran 1					120,34			117,69
	Kategori sasaran 1			Istimewa			Istimewa		
Sasaran 2	Meningkatnya akses informasi publik	Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	83,3	66,67	85,36	85,70	66,67	80,36
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	100,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00



		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	20,93	20,93	100,00	32,55	32,55
	Rata-rata sasaran 2					74,75			70,11
	Kategori sasaran 2			Baik			Cukup		
Sasaran 3	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	Persen	100,00	27,90	27,90	100,00	100,00	100,00
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata sasaran 3					81,98			100,00
	Kategori sasaran 3			Baik			Baik		
	Rata-rata sasaran 1,2,3					92,03			95,93
	Kategori sasaran 1,2,3			Sangat Baik			Baik		



Tabel 3.4 tersebut di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2025 mencapai **95,93%**. Capaian kinerja ini mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai **92,03%** dengan kategori yang sama yaitu **BAIK**.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (dengan target akhir renstra tahun 2021-2026)

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SAT	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Tujuan 1	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,80	2,90	103,57	3,00	96,67
Sasaran 1	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Nilai	2,80	2,90	111,53	3,00	96,67
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	40,00	16,50	49,50	46,67	35,35
	Rata-rata sasaran 1					120,34		110,67
	Kategori sasaran 1			Istimewa			Istimewa	
Sasaran 2	Meningkatnya akses informasi publik	Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	85,70	66,67	77,79	87,5	76,19
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	32,55	32,55	100,00	20,93
	Rata-rata sasaran 2					70,11		72,37

	Kategori sasaran 2			Cukup			Cukup	
Sasaran 3	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	27,90
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata sasaran 3					100,00		81,98
	Kategori sasaran 3			Baik			Baik	
	Rata-rata sasaran 1,2,3					95,93		88,34
	Kategori sasaran 1,2,3			Baik			Baik	

Tabel 3.5 tersebut di atas menginformasikan bahwa realisasi indikator kinerja Dinas Komunikai dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra 2021-2026 yaitu 95.93% capaian tahun 2025 melebihi target renstra sebesar 88,34% ,dengan kategori **BAIK**.

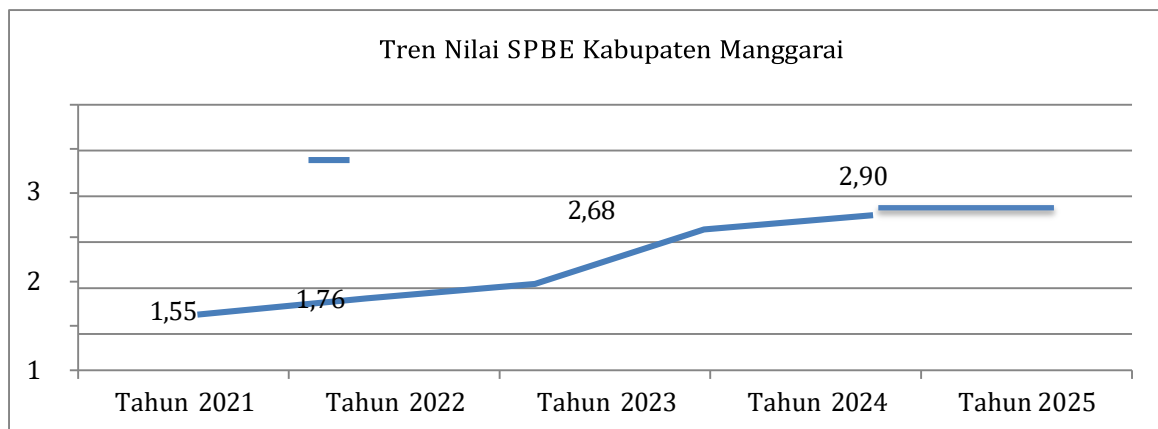
3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

TUJUAN 1
MENINGKATNYA BIROKRASI YANG KAPABEL
Indikator : Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator : Indeks SPBE

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui 1 (satu) IKU dengan rata- rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 2,90 atau 103,57% kategori capaian kinerja Sangat Baik

Indikator Tujuan Nilai SPBE Kabupaten

Target 2,60 (B) → Realisasi 2,90 → Capaian Kinerja 111,53% → ISTIMEWAA



Sumber : LHE Kementerian PANRB

Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 masih mengacu pada Keputusan MENPANRB no.663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 dengan predikat **"BAIK"**. Karena tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tidak masuk dalam evaluasi tetapi disiapkan untuk menuju Ke Pemerintaan Digital (PEMDI)

sebagaimana data pada tabel 3.1. di atas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

SASARAN 1 : OPTIMALNYA INTEGRASI LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELKTRONIK

1. Indeks SPBE

Target Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah 2,80 dan realisasinya 2,90 dengan kategori BAIK.

Capaian ini mengacu kepada capaian tahun 2024 dimana tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai salah satu kabupaten yang tidak lagi dipantau atau dievaluasi. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat bahwa Instansi Pemerintah Pusat/Daerah (IPPD) yang indeks SPBE-nya mencapai target dengan kategori BAIK akan bertransformasi ke Pemerintahan Digital (Pemdi) yang pelaksanaannya masih menunggu petunjuk lebih lanjut.

Tabel Capaian Indeks SPBE dari Tahun 2020 s/d 2025

No	Tahun	Indeks	Kategori	Bertambah/berkurang(+/-)
1	2020	1,91	CUKUP	
2	2021	1,55	KURANG	-0,36
3	2022	1,76	KURANG	+0,21
4	2023	2,68	BAIK	+1,01
5	2024	2,90	BAIK	+0,22
6	2025	2,90	BAIK	

2. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa.

Capaian kinerja kelembagaan pemerintah dapat dilihat dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik tidak terlepas dari berbagai bentuk inovasi dan Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)

Kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima yang sesuai dengan perkembangan teknologi , informasi dan Komunikasi dapat dilihat dari Skor Indeks SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terus meningkat.

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 %, target ini setara dengan terdata 4 (empat) layanan publik, sedangkan realisasi pada tahun 2025 masih sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu terdata 8 (delapan) layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, atau jika di persentasikan setara dengan 200%; yaitu dari $200\%/100\% * 100 = 200\%$; atau 8(Delapan) di bagi 4 (empat) dikali 100% sama dengan 200 %, capaian ini masih sama jika dibandingkan dengan capain tahun 2024, karena pada tahun 2025 masih terdata 8 layanan public yang online dan terintegrasi yaitu yaitu PPID,SP4N Lapor,SPSE,JDIH,OSS,E-PPGBM,New siga BKKBN,SIKS-NG ; dari target 4 layanan yaitu SP4N Lapor,PPID, SPSE, JDIH;

3. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi;

Layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi adalah suatu sistem layanan adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain juga merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu, misalnya data dari satu bagian dibawa kebagian lain, dan oleh petugas administrasi data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Jadi kalau secara manual maka derajat integrasinya menjadi tinggi.

Layanan Administrasi Pemerintahan Pada tahun 2025 terdata 164 layanan masih sama dengan tahun 2024

Dinas komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 40,00 % atau setara dengan 66 layanan; dengan perhitungan yaitu 40%

$*164 = 66$, berarti harus ada 66 layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi tahun 2025. Sedangkan realisasi tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 yaitu masih terdata sebanyak 27 layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi, akumulasi dari tahun 2022 sampai tahun 2025, jumlah ini jika dipersentasikan setara dengan 16,46 % , sehingga Capaian kinerja untuk indicator ini pada tahun 2025 sebesar 41,15 %, (yaitu dari $16,5\% / 40\% * 100 = 41,15\%$) Capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan.

Walaupun tidak ada penambahan aplikasi pada tahun 2025 dan capaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 lebih kecil karena target yang ditetapkan tahun 2025 lebih besar dari target tahun 2024

SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSES INFORMASI PUBLIK:

1. Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah salah satu kelompok yang secara mandiri dan kreatif dibentuk oleh masyarakat guna melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi, diharapkan kelompok ini sudah ada di 12 kecamatan yg ada di Kabupaten Manggarai.

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 85,70 %,atau setara dengan terdapat 10 (Sepuluh) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2025. akan tetapi realisasi sampai dengan tahun 2025 masih sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu hanya terdapat delapan (8) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk jumlah ini setara dengan 66,67 %, hal ini karena tidak ada alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan ini,sehingga capaian kinerja untuk indicator ini tahun 2025 sebesar 77,79 % berkurang sebesar 2,21% dari tahun 2024, dengan perhitungan yaitu : $66,67\% \div 85,70\% \times 100\%$ sama dengan 77,79 %.

2. Persentase diseminasi dan layanan informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM).

Capain kinerja indicator ini pada tahun 2025 lebih kecil dari capaian kinerja tahun 2024 , dimana tahun 2024 ada enam(6) layanan dari target 5 layanan sehingga relisasinyaa mencapai 120%, sedangkan realisasi tahun 2025 hanya mencaipaia 100%, berkurang satu layanan yaitu Antara digital media yang pada tahun 2025 sudah tidak aktif lagi sehingga realisasinya mencapai 100 % ,yaitu Dari target 5 (Website, LPPL RSPD,media sosial ,PPID, SP4N Lapor) Diseminasi dan layanan informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi terdapat 5 layanan pada tahun 2025 yaitu Website, LPPL RSPD,Media sosial, PPID, SP4N Lapor ; dengan perhitungan lima (5) dibagi lima (5) dikali seratus persen (100%) sama dengan seratus persen (100%) .

3. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo .

Target capaian indicator ini pada tahun 2025 adalah 100 % dalam arti semua Perangkat daerah (43 PD) sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo akan tetapi realisasi pada tahun 2025 hanya ada 14 Perangkat Daerah yaitu PPO, Dinkes, Kec. Satarmese, Kec. Satarmese Barat, Kec. Satarmese Utara, Kec. Cibal, Kecamatan Cibal Barat, Kec. Wae Rii, kec. Langke Rembong, Kec. Reok, Diskominfo, Kec. Ruteng tambah dengan kecamatan Reo Barat sehingga capaian kinerja indicator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 32,55 % dengan perhitungan empat belas (14) dibagi Empat Puluh Tiga (43) dikali Seratus persen (100 %) sama dengan tiga puluh dua koma lima puluh lima persen (32,55) capaian ini melebihi capaian pada tahun 2024 sebesar 23,25 %

SASARAN 3 : OPTIMALNYA LAYANAN PERSANDIAN DAN KUALITAS STATISTIK DAERAH :

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian indicator ini pada tahun 2025 adalah 100 % dan realisasinya mencapai 100% sama dengan realisasi tahun 2024, dalam arti semua Perangkat Daerah sudah menggunakan sandi dalam berkomunikasi , hal ini dilihat dari semua Perangkat Daerah sudah memiliki Mail Manggaraikab.go.id

4. Persentase sistem data statistik yang terintegrasi;

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Target Capaian indicator ini pada tahun 2025 sebesar 100% dan realisasinya mencapai 100 % , capaian ini lebih besar dari capaian tahun 2024 ,hal ini karena tahun 2025 semua Perangkat daerah sudah terintegrasi dengan E-Wali data SIPD-RI,

5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;

Pada tahun 2025 ditetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 % dan realisasi nya mencapai 100 % dengan penjelasan bahwa semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai dalam Angka kesemua perangkat daerah, dengan demikian diharapkan semua PD menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan.

6. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;

Pada tahun 2025 ditetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 % dan realisasinya mencapai 100 % dengan penjelasan bahwa semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai dalam Angka kesemua perangkat daerah, dengan demikian diharapkan semua PD menggunakan data statistik yang dalam buku tersebut.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami sedikit kenaikan sebesar 3,39 % , yaitu dari 92 % pada tahun 2024 menjadi 95,93 % tahun 2025, akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja yang belum memenuhi target, ke depannya akan menjadi tugas dan Perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika agar lebih bagus dan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.4. Inovasi Dinas Kominfo

Laporan Realisasi Inovasi Tahun 2025

Nama Inovasi : LANTIK (Layanan TIK)

Beberapa jenis layanan diberi nama LANTIK (Layana TIK).Layanan yang sebelumnya dilayani secara manual diimigrasikan secara elektronik melalui google site pada link :

<https://sites.google.com/view/lantikkominfoManggarai/halaman-muka>

6 layanan yang disediakan antara lain, yakni :

1. Fasilitasi Peralatan Zoom Meeting
2. Layanan Hosting Aplikasi
3. Layanan Sertifikat Elektronik
4. Layanan Pemberian Nama Domain manggaraikab.go.id
5. Layanan Pengguna Aplikasi SRIKANDI
6. Layanan Optimalisasi Website Aplikasi

Target :

6 layanan yang disediakan berjalan dengan baik, dengan realisasi tahun 2025 100%

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan *good and clean governance*. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi.

3.5.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Pada tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sebanyak 19 orang, CPNS sebanyak 11 Orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 10 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 3 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2025

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-		1	1
3	Kepala Bidang	-	-		3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5.	Pejabat Fungsional			5		5
6.	Staf	-	5	15	-	20
JUMLAH		-	5	9	5	30
P3K				10		10
THL		1		2		3

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 4.1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun
2025

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang		3	-	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		1	-	-	1
5.	Pejabat Fungsional	-	5	-	-	5
6.	Staf		15	2	3	20
Total			23	2	3	30
P3K			10			10
THL					3	3

Tabel 3.4.1.3
Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2025

NO.	NAMA PEGAWAI	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	PAULUS JERAMUN,M.Si	19770720 200604 1 011	Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Kepala Dinas /Sekretaris
2	METODIUS SANTOSA JEMAT, ST	19751112 200501 1 008	Pembina, IV/a	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik
3	VALENTINUS ARKIAN,S. Sos	19720102 200604 1 023	Pembina, IV/a	Kabid Persandian dan Statistik
4	MATILDA HERLINA IRMA, SM	19740703 199903 2 004	Pembina, IV/a	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi
5	DOROTEUS TAMPUNG,SH	19750925 201001 1 012	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	VINSENSIA ARDIANA SUI, SE	19790820 201212 2 003	Penata Tk. I, III/d	Perencana Ahli Muda
7	MATEUS BAMBUNG, SE	19800805 200903 1 005	Penata Tk. I, III/d	Statistisi Ahli Muda
8	BLASIVUS AMAN, SE	19790923 201212 1 003	Penata Tk. I, III/d	Manggala Informatika Ahli Muda
9	CYPRIANUS EDUPATMAN, ST	19791130 2011011 005	Penata Tk. I, III/d	Sandiman Ahli Muda
10	LAURENSIANA G.K. NUENG, A.Md	19691101 200604 2 013	Penata , III/C	Sandiman Ahli Muda
11	AGUSTINUS N. DUDI, ST	19890828 201903 1 007	Penata Tk.I , III/b	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan



12	VALERIA VIANY, S.Si	19920505 201903 2 018	Penata Tk.I , III/b	Sandiman Ahli Pratama
13	DONATA AGNINOY JARUT, S.Kom	19930807 202012 2 020	Penata Tk.I , III/b	Operator Sandi dan Telekomunikasi
14	PIUS JEHAUT	19720903 200801 1 015	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Perkantoran
15	ELVIANA NURTI, A.Md	19880529 201903 2 008	Pengatur Tk I, II/d	Pranata Alat Persandian
16	KORNELIS KOLOL	19701209 200701 1 022	Pengatur Tk I, II/d	Operator Layanan Operasional
17	ROFINA KIUL	19750409 200701 2 017	Pengatur Tk I, II/d	Pengadministrasi Perkantoran
18	REGINA SEMITA, SE	19790317 202421 2 006	IX	Arsiparis Ahli Pertama
19	INSENSIUS RANOMAN,S.Kom	19870812 202421 1 015	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama
20	KRISTIANUS RISALDO MADUR,MM	19890615 202421 1 021	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
21	LAURENSIUS JEBARU, S.Pd	19810612 202421 1 006	IX	Perencana Ahli Pertama
22	FALENTINUS DAMIN, S.I.P.	19820109 202421 1 002	IX	Perencana Ahli Pertama
23	GABRIELA POSENTIA, S.I. Kom	20020227 202506 2 006	Penata Muda, III/a	Fasilitasi Pemerintahan
24	FISRA BELIAN KELIWAWA, S.Kom	20001026 202506 1 006	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
25	EFADIA RESTA PANGGUT,SE	19990506 202506 2 009	Penata Muda, III/a	Fasilitasi Pemerintahan
26	DILAN MARCELO SINAGULA, S.Kom	19981214 202506 1 003	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
27	WILLYAM GULNALIS DAGUL, S.Kom	20010608 202506 1 009	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
28	DIEGO JAMES OCTORES, S.Kom	20011006 202506 1 003	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
29	FITRAH PRAYOGI, S.Kom	19950307 202506 1 008	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
30	METODIUS ADE PUTRA, S.M	19980214 202506 1 004	Penata Muda, III/a	Fasilitator Pemerintahan
31	YULIUS ELVIS ADIPUTRA, S.I.Kom	19990522 202506 1 004	Penata Muda, III/a	Fasilitator Pemerintahan

32	HEDWIG MAYELLA, S.Ds	20001016 202506 2 003	Penata Muda, III/a	Pengendali Konten Internet
33	MIKHAEL DEMARIO PRATAMA, S.Kom	20000523 202506 1 005	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
34	LYDIA AVELINA SURMIYANTI	19900520 202521 2 038	V	Pengadministrasi Perkantoran
35	PETRUS MELANIUS NASRANI, S.Sos	19760916 202521 1 008	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pratama
36	MARIA Y. B. WODON	19811129 202521 2 007	V	Pengadministrasi Perkantoran
37	APOLINARIS EMANUEL NENANG	19810214 202521 1 014	V	Pengadministrasi Perkantoran
38	LEONARDUS A. W. KEPENTARA, S. Kom	19871110 202521 1 027	IX	Pranata Komputer Ahli Pratama
39	YALDI SUPRATMAN H. SIKANDAR.A.Md.	19890403 202521 1 042	VII	Pengelola Layanan Operasional
40	WENSISLAUS RUDI NOVIANTO, SE	19861112 202521 1 048	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

3.5.2. Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai melaksanakan 5 program dan 9 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 3.221.654.341,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.095.548.732,- dengan tingkat capaian sebesar 96,08 %, realisasi fisik 100 %.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.1
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	3.130.154.341;	3.004.130.432,00	95,97
	Belanja Pegawai	2.147.179.034;	2.023.487.741,00	94,24
	Belanja Barang dan Jasa	982.975.307;	980.642.691,00	99,76
2	Belnja Modal	91.500.000;	91.418.300,00	99,91
	Jumlah Belanja	3.221.654.341;	3.095.548.732,00	96,08



Tabel 3.4.2.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	%	PAGU PERUBAH	REALISASI	%
1	2		3	4	5		6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.539.806.966	2.414.420.863	95,06
2.16.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.440.000	7.440.000	100,00
2.16.01.2.01.0004	-	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6.450.000	6.450.000	100,00
2.16.01.2.01.0006	-	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	4 laporan	4 laporan	100%	990.000	990.000	100,00
2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.176.559.034	2.052.780.241,00	94,31
2.16.01.2.02.0001	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 orang/bulan	31 orang	129%	2.147.179.034	2.023.487.741,00	94,24
2.16.01.2.02.0002	-	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	27.400.000	27.312.500	99,68
2.16.01.2.02.0005	-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	4 laporan	150%	990.000	990.000	100,00
2.16.01.2.02.0007	-	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2 laporan	3 laporan	150%	990.000	990.000	100,00



2.16.01.2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah					92.486.100	92.138.600,00	99,62
2.16.01.2.06.0001	-	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan	1 paket	1paket	100%	8.375.000	8.375.000	100,00
2.16.01.2.06.0002	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1paket	100%	19.040.500	19.040.500	100,00
2.16.01.2.06.0004	-	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1paket	100%	9.600.000	9.600.000	100,00
2.16.01.2.06.0005	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1paket	100%	9.977.600	9.977.600	100,00
2.16.01.2.06.0007	-	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket	1paket	100%	9.383.000	9.383.000	100,00
2.16.01.2.06.0009	-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rakoor SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	36.110.000	35.762.500,00	99,04
2.16.01.2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					233.571.832	233.510.332,00	99,97
2.16.01.2.08.0001	-	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	3 laporan	3 laporan	100%	4.810.000	4.810.000	100,00
2.16.01.2.08.0002	-	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air listrik yang disediakan	3 laporan	3laporan	100%	228.761.832	228.700.332,00	99,97
2.16.01.2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					29.750.000	28.551.690,00	95,97
2.16.01.2.09.0002	-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	2 unit	2unit	100%	21.000.000	19.801.690,00	94,29
2.16.01.2.09.0006	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	7 unit	100%	8.750.000	8.750.000	100,00
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					569.292.375	569.067.469	99,96
2.16.02.2.01		Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten					569.292.375	569.067.469	99,96
2.16.02.2.01.0015	-	Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dins Kominfo	10 klpk	8 klpk	80%	3.680.000	3.680.000	100,00



2.16.02.2.01.0017	-	Pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	9.120.000	9.120.000	100,00
2.16.02.2.01.0021	-	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /juknis	6 media	6 Media	100%	347.610.000	347.608.300	100,00
2.16.02.2.01.0024	-	Penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek	15 orang	15 orang	100%	208.882.375	208.659.169	99,89
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						78.680.000	78.185.400	99,37
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						78.680.000	78.185.400,00	99,37
2.16.03.2.02.0015	-	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBEdi lingkungan Pemda	1 laporan	1 laporan	100%	33.360.000	32.875.400,00	98,55
2.16.03.2.02.0023	-	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten atau Kota cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program kabupaten kota cerdas	43 PD	43 PD	100%	30.320.000	30.320.000	100,00
	-	Koordinasi Pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Jumlaah aplikasi umum yang telah dimanfaatkan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	15.000.000	14.990.000,00	99,93
2.20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						29.895.000	29.895.000	100,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota						29.895.000	29.895.000	100,00
2.20.02.2.01.0009	-	Peningkatan data statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis teppat waktu	100%	100	100%	29.895.000	29.895.000	100,00
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						3.980.000	3.980.000	100,00



		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota					3.980.000	3.980.000	100,00
	-	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah lapran analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdayakeamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota	1 Laporan	1 laporan	100%	3.980.000	3.980.000	100,00
		Total Belanja Operasi dan Belanja Modal					3.221.654.341	3.095.548.732	96,09

3.5.3. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.4.3.1
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.539.806.966	2.414.420.863	95,06
Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Program: Aplikasi Informatika	78.680.000	78.185.400	99,37
Total Anggaran Sasaran 1		2.618.486.966,00	2.492.606.263,00	97,22
Meningkatnya akses informasi publik	Program: Informasi dan Komunikasi Publik	569.292.375	569.067.469	99,96

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Total Anggaran Sasaran 2		569.292.375	569.067.469	99,96
Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	Program: Penyelenggaraan statistik sektoral	29.895.000	29.895.000	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.980.000	3.980.000	100,00
Total Anggaran Sasaran 3		33.875.000	33.875.000	100
Jumlah		3.221.654.341	3.095.548.732	96,09



3.5.4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2025.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

3.5.4.1. Efektif apabila target kinerja sasaran tercapai.

3.5.4.2. Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **efisien** dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **tidak efisien**.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.4.1
Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien / Tidak Efisien
1	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	117,69	Efektif	97,22	Efisien
2	Meningkatnya akses informasi publik	70,11	Tidak Efektif	99,96	Tidak Efisien
3	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	100,00	Efektif	100,00	Efisien
Rata-rata		95,93	Tidak Efektif	96,09	Tidak Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.13 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran **95,93%** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program-program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar **96,09%**, menunjukkan penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang ***tidak efektif*** dan ***tidak efisien***.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan sebuah pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dikelompokkan ke beberapa kategori tertentu. Kategori capaian menunjukkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mempunyai beberapa prinsip dan salah satunya adalah **akuntabilitas**. Prinsip ini membuka ruang adanya control masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kontrol tersebut harus direspons dengan baik oleh pemerintah. LKIP ini dibuat untuk merespons kontrol masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupptan Manggarai telah memperlihatkan capaian kinerja yang **BAIK** atas sasaran-sasaran strategisnya. Uraian terinci atas ketiga sasaran dimaksud dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Capaian Kinerja
Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Tahun 2023	
		Nilai Capaian Kinerja (%)	Kategori / Interpretasi
1.	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	117,69	ISTIMEWA
2.	Meningkatnya akses informasi publik	70,11	CUKUP
3.	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	100,00	ISTIMEWA
RATA-RATA		95,93	BAIK

Terhadap capaian indikator yang masih kategori kurang atau belum mencapai target, dan untuk mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran di setiap Bidang agar memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah
2. Penempatan SDM sesuai Kapasitas
3. Peningkatan sarana prasarana

Jika laporan ini belum bisa memenuhi harapan, dengan rendah hati disampaikan permohonan maaf. Kritikan yang berbobot dan konstruktif untuk bekerja LEBIH BAIK di hari esok sangat diharapkan. Bekerja lebih baik tidak sekedar untuk mendapatkan sebuah LKIP dengan predikat Memuaskan, Sangat Baik, Baik, Cukup ataupun Kurang, tetapi terutama untuk mewujudkan **MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING.**

Ruteng, 6 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI,



PAULUS JERAMUN, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19770720 200604 1 011

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Perencana Ahli Muda	



RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Nilai	2,80
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00
		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	40,00
2	Meningkatnya akses informasi publik	Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	85,70
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	100,00
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00
3	Optimalnya layanan persandian dan kualitas statistik daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	Persen	100,00
		Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	Persen	100,00
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00

Ruteng, 20 September
2025

PLT.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI,



PAULUS JERAMUN,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19770720 200604 1 011



PERJANJIAN KINERJA PEUBAHAN TAHUN 2025
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PAULUS JERAMUN, M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.
MANGGARAI

Selanjutnya di sebut pihak pertama.

Nama : HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, MA

Jabatan : BUPATI MANGGARAI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran perubahann tahun anggaran 2025, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Manggarai,

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 15 oktober 2025
Pihak Pertama
Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,


PAULUS JERAMUN, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19770720200604 1 011

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PLT.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI

No	Sasaran Stretagis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatkan keamanan dan kualitas data informasi dan komunikasi pelayanan publik berbasis digital”.		Indeks SPBE	Nilai	2,80
1.	Meningkatnya Keterbukaaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan informasi Publik	Persentase	87,50
2.	Meningkatnya penerapan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah	Indeks SPBE	Persentase	3,30
3.	Meningkatnya Perangkat Darah yang menerapkan Smart city	indeks Smart City	Persentase	2,78
4.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik	Indeks pembangunan statistik	Persentase	
5.	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Terhadap Pelayanan Persandian	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	skor	0-174

No	Uraian	Satuan	Target
1.	Jumlah Inovasi	Inovasi	2
2.	Jumlah Penerimaan /PAD :	Rp.	10.000.000
	a. Retribusi RSPD Kabupaten Manggarai	Rp.	10.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.539.806.966,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	569.292.375,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	78.680.000,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.895.000,00	APBD
5.	Program Penyelnggaraan Persandian untuk	3.980.000,00	APBD

	Pengamanan Informasi		
Jumlah		3.221.654.341,00	APBD

Pihak Kedua
Bupati Manggarai,

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 15 Oktober 2025
Pihak Pertama
Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



PAULUS JERAMUN,M.si
PEMBINA TK. I
NIP. 19770720200604 1 011

PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI				REALISASI KINERJA S/D TW. INI	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI				REALISASI KINERJA S/D TW. INI	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN S/D TW. INI	% PENYERAPAN ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB					
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV							TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	11 (10/5 x100)	12	13	14	15	16	17	18	19	20 (16+17+18+19)	21 (20/15 x 100)	22	23	24 (23/2x100)	25					
1.	Optimalnya integrasi layanan Pemerintah berbasis elektronik	1. Indeks SPBE	Nilai	2,8	0	0	0	2,9	2,9	104%	Program pengelolaan aplikasi informatika										Rp78.680,000	Rp	78,185,400	99,37%	Dinas Kominfo				
		2. Persentase layananPublik yangdi selenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	0	0	0	200	200	200%	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											Rp78.680,000	Rp	78,185,400		99,37%			
		3. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegras	Persen	40,00	0	0	0	16,9	16,9	#VALUE!	1 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah di tetapkan di pusat data Nasional	Aplikasi	1	0	0	0	0	0	0%	Rp0	Rp	-	0%					
											2 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	0	0	0	1	1	100%	Rp33,360,000	Rp	32,875,400	98,55%					
											Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkatDaerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota cerdas	Unit	1	0	0	0	43	43	4300%	Rp30,320,000	Rp	30,320,000	10000%					
																					Rp15,000,000	Rp	14,990,000	99,93%					
Rata-rata Sasaran Strategis 1											#VALUE!											Rp78.680,000	Rp78.185,400	99,37%					
2.	Meningkatnya Akses Informasi Pub lik	1. Persentase kelompok informasi masyarakat yang menybr informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	85,70	0	0	0	66,67	66,67	#VALUE!	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik											Rp569,292,375	Rp	569,067,469	99,96%				
		2. Prsentase diseminasi dan layanan informasi publik yang di laksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	100	0	0	0	100	100	100%	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah											Rp569,292,375	Rp	569,067,469	99,96%				
		3. Persentase OPD yang terhubung degan akses internet yangdi sediakan oleh dinas Kominfo	Persen	100	0	0	0	32,55	32,55	33%	1 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiamiinasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kelompok Komunitas	10	0	0	0	8	8	80%	Rp3,680,000	Rp	3,680,000	100%					
											2 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persen	100	0	0	0	100	100	100%	Rp0,120,000	Rp	9,120,000	100%					
											3 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kegiatan Rekomendasi	1	0	0	0	5	5	500%	Rp0	Rp	-	0%					
											4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang di kelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	Media	6	0	0	0	6	6	100%	Rp347,610,000	Rp	347,608,300	100,00%					
											5 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang di fasilitasi mengikuti Bimtek/pelatihan	Orang	15	0	0		0	0%	Rp208,882,375	Rp	208,659,169	99,89%						
Rata-rata Sasaran Strategis 2											#VALUE!	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN														Rp569,292,375	Rp	569,067,469	99,96%
3.	OptimalnyaLayanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalamkomunikasi	Persen	100	0	0	0	100	100	100%	Program Penyelenggaraan statistik sektoral											Rp29,895,000	Rp	29,895,000	100,00%				
		2. Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	Persen	100	0	0	0	100	100	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											Rp29,895,000	Rp	29,895,000	100,00%				
		3. Persentase OPD yangmenggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	0	0	0	100	100	100%	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang nilai tepat waktu	Persen	100	0	0	0	100	100	100%	Rp29,895,000	Rp	29,895,000	100,00%					
		4. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah	Persen	100	0	0	0	100	100	100%	Program penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi											Rp3,980,000	Rp	3,980,000	100%				
											Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											Rp3,980,000	Rp	3,980,000	100%				
											Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	1	1	100%	Rp3,980,000	Rp	3,980,000	100%					
											Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota											Rp2,573,681,966	Rp	2,448,295,863	95,13%				
											Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah											Rp7,440,000	Rp	7,440,000					
											1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	2	2	100%	Rp6,450,000	Rp	6,450,000	100%					
											2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	4	4	100%	Rp990,000	Rp	990,000	100%					
											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Rp2,176,559,034	Rp	2,052,780,241	94,31%				

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN KOMBANG
DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN
DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN
Jalan K. A. G. Pradipati No. 101
Telp. (0271) 401201, 401202, 401203
Fax. (0271) 401204, 401205
Email: pda@kabkombar.go.id
Website: www.kabkombar.go.id